

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka dan kemudian mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Prinsipal diartikan sebagai pihak yang memberi wewenang, sedangkan agen diartikan sebagai pihak yang mendapat wewenang. Dalam praktik pelaporan keuangan, bank perkreditan rakyat bertindak sebagai agen yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna informasi laporan keuangan. Sedangkan pengguna laporan bertindak sebagai *principal*, yaitu pihak yang menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, social, maupun politik.

Menurut Saryani (2014), dalam hubungan *principal* (masyarakat) dan agen (manajemen perbankan) pada perusahaan perbankan dipengaruhi dengan keberadaan regulator yaitu pemerintah melalui Bank Indonesia (BI). Hal tersebut menjadi dasar bahwa *principal* memberikan tanggungjawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sesuai dengan kebijakan yang telah disahkan oleh regulator dalam hal ini adalah BI.

Menurut Lubis (2009) menjelaskan dari sisi *principal* kompensasi atas kinerja yang diberikan kepada agen hanya berdasarkan pada hasil, sedangkan sisi agen berpendapat jika kompensasi tersebut tidak hanya berdasarkan dengan kinerja keuangan perbankan, karena manajemen bank tidak bisa dipisahkan dengan pencapaian tujuan serta kinerja dari suatu bank.

2.2 Sistem Pengendalian Internal

2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta

milik perusahaan, memeriksa ketelitian, dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 bahwa, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh SDM dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan tertentu (PP No. 60 Tahun 2008). Sedangkan Mulyadi (2013), menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

Pengendalian internal control menurut COSO tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keinginan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik baiknya. Bahkan bagaimanapun baiknya pengendalian internal yang ideal di rancang, namun keberhasilannya bergantung pada kompetisi dan kendala dari pada pelaksanaannya dan tidak terlepas dari berbagai keterbatasan.

Komponen pengendalian Internal menurut COSO :

1) Lingkungan Pengendalian (Control Invironment)

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi.

2) Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Menurut COSO, penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu

peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi.

3) **Aktivitas Pengendalian (Control Activities)**

Menurut COSO, aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

4) **Informasi Dan Komunikasi (Information And Communication)**

COSO menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal.

5) **Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities)**

Aktivitas pemantauan menurut COS merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal mempengaruhi fungsi fungsi dalam setiap komponen, ada dan berfungsi.

Berdasarkan konsep COSO, bahwa pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tiga kategori tujuan yang memungkinkan organisasi untuk fokus pada aspek pengendalian internal yang berbeda, yaitu :

- a. Tujuan-tujuan operasi berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, dan untuk menjaga aset dan kerugian.

- b. Tujuan-tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan baik untuk kalangan internal maupun eksternal yang memenuhi kriteria handal, tepat waktu, transparan dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah, pembuatan-pembuatan standar yang diakui, ataupun kebijakan-kebijakan entitas.
- c. Tujuan-tujuan ketaatan berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dengan nama entitas merupakan subjeknya.

2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.3.1 Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi semakin lama semakin meningkat. Teknologi Informasi (TI) ini berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu proses pengolahan dan penyebaran data dengan memanfaatkan alat perangkat komputer dan telekomunikasi untuk kegiatan yang dilakukan seseorang. Teknologi Informasi di Indonesia ikut berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin modern. "Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan hardware, software, teknologi penyimpanan data, dan teknologi komunikasi" (Laudon, 2006: 174).

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju akan memudahkan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan yang lebih akurat dan tepat serta memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih besar. Pekerjaan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, akan tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi ini akan membutuhkan dana yang lebih besar (Ningrum, 2018).

Menurut Setyowati, Isthika, & Pratiwi (2016) Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Komarasari (2016) Untuk meningkatkan kinerja organisasi/instansi pemerintah dalam kerangka

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan e-government sangat penting dalam memanfaatkan teknologi informasi.

2.4 Kapasitas Auditor Internal

2.4.1 Pengertian Audit Internal

Menurut Institute of Internal Auditors (IIA), Audit internal adalah aktivitas assurance yang objektif dan konsultasi yang independen, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan memperbaiki operasi suatu perusahaan. Aktivitas ini membantu organisasi mencapai tujuan-tujuannya melalui suatu pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses manajemen risiko, kontrol dan tata kelola perusahaan.

Aktivitas-aktivitas audit internal dilakukan dalam lingkungan-lingkungan yang berbeda secara hukum dan budaya; dalam organisasi-organisasi yang berbeda tujuan, ukuran, dan struktur; dan oleh orang-orang yang ada di dalam atau di luar organisasi. Perbedaan-perbedaan ini dapat mempengaruhi praktik audit internal dalam tiap lingkungan (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing).

2.4.2 Fungsi dan Tujuan Audit Internal

Fungsi audit internal dijalankan oleh auditor internal. Auditor internal adalah auditor yang dipekerjakan oleh satu perusahaan, persekutuan, badan pemerintah, individu, dan entitas lainnya (Messier et al, 2006). Menurut Mulyadi (2002), auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan.

2.4.3 Peran Auditor Internal

Seorang pemimpin perusahaan atau dalam hal ini adalah bank, tidak mungkin melaksanakan semua kegiatan operasi secara langsung sehingga dalam proses pengawasan terhadap hartanya tidak bisa dia lakukan sendiri. Oleh karena itu, manajemen harus mengawasi jalannya operasi agar berjalan efektif, manajemen juga bergantung terhadap laporan-laporan dan hasil analisis yang

benar. Hal ini memaksa manajemen harus melimpahkan sebagian kekuasaan kepada bawahannya namun tanggung jawab tetap berada ditangan seorang pemimpin.

Bank Indonesia, melalui Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, menyatakan dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank, diperlukan adanya pelaksanaan fungsi audit intern bank yang efektif. Ukuran minimal yang harus dipatuhi dan diwajibkan bagi semua bank termasuk didalamnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam melaksanakan fungsi audit internal adalah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB). Berdasarkan SPFAIB tersebut, bank wajib untuk menyusun Piagam Audit Internal (Intern Audit Charter), membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAD) dan menyusun panduan audit intern. SKAI bertugas dan bertanggungjawab untuk :

- a. Membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

2.4.4 Faktor yang mempengaruhi Kapasitas Auditor Internal

Profesionalisme harus menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi audit internal oleh SKAI. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, auditor internal secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama harus mempunyai :

- a. Pengetahuan yang memadai dalam bidang tugasnya yaitu pengetahuan mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan spesialisasinya.
- b. Perilaku yang independen, jujur, objektif, tekun, dan loyal

- c. Kemampuan mempertahankan kualitas profesionalnya melalui pendidikan profesi lanjutan yang berkesinambungan.
- d. Kemampuan melaksanakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.
- e. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.

2.5 Kualitas Laporan Keuangan

2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggung jawaban dari kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh sebuah entitas. Laporan keuangan menurut PSAK No.1 “Laporan keuangan adalah penyajian tersruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini menyajikan perjalanan sejarah sebuah entitas yang dikualifikasikan dalam nilai moneter. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuang tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya, juga dapat dibandingkan dengan perusahaan lain.

Penyusun Laporan keuangan harus memiliki kemampuan untuk menyajikan secara jelas dan transparan mengenai kesahatan keuangan suatu perusahaan yang bertujuan untuk memberikan sebuah keputusan bisnis yang informatif. Sehingga tidak boleh ada kecurangan didalam penyusunan sebuah laporan keuangan suat perusahaan.

Manajemen perusahaan sangat membutuhkan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan maupun menyusun sebuah perencanaan. Itulah mengapa sebuah perusahaan harus berusaha untuk selalu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Tjiptono “Kualitas laporan keuangan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi”. Menurut Fahmi dalam Sri Fajri kualitas laporan keuangan adalah “Merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh suatu entitas pelaporan”.

Laporan keuangan menggambarkan mengenai kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, baik buruknya kondisi keuangan suatu organisasi dapat dilihat melalui laporan keuangan organisasi tersebut. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standarakuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas. Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban mengenai kondisi keuangan suatu entitas dalam jangka waktu tertentu.

2.5.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- g. Informasi keuangan lainnya.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2012, menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2.5.3 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut:

1) Relevan

Informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Informasi yang relevan mengandung beberapa unsur yaitu meliputi :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balikan dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang.
- b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
Informasi tersebut dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu
Informasi disajikan secara tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap
Informasi keuangan yang disajikan selengkap mungkin agar memudahkan pengguna yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2) Andal (reliability)

Artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Laporan keuangan yang andal memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Disajikan secara jujur (faithfulness of presentation) Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujiannya dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netral dalam penyajian (neutrality)
- d. Laporan keuangan tidak bersifat tendensis dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.

3) Dapat dibandingkan dan dapat dipahami

Artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai perbandingan kinerja periode sebelumnya atau perbandingan kinerja organisasi lain yang sejenis, serta memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Table 1. Penelitian Terdahulu

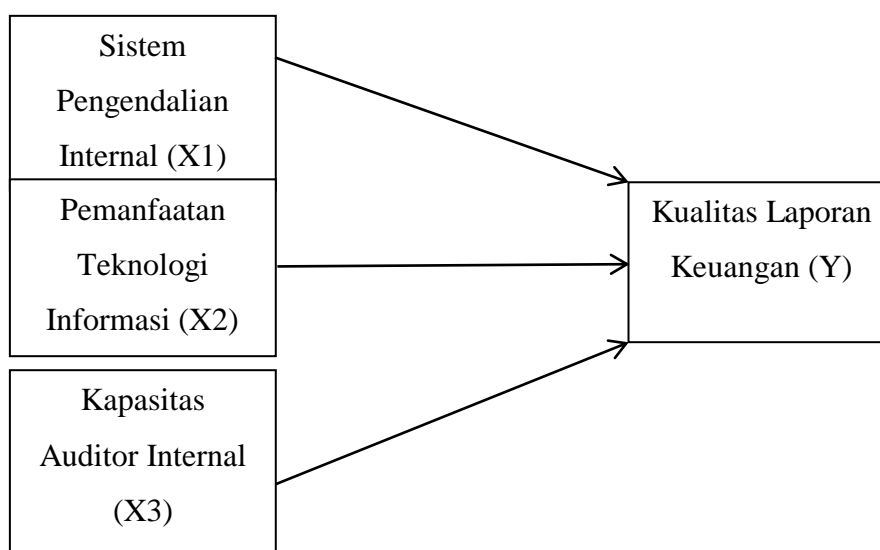
No	Judul Penelitian	Penulis	Hasil
1	Hubungan Peran Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Pada Bank Syariah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah)	Amiyati (2012)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Audit Internal memiliki hubungan terhadap Efektivitas Pengendalian Internal. Peran Audit Internal mempunyai korelasi positif terhadap Efektivitas Pengendalian Internal, keduanya berhubungan positif dan kuat. Persamaannya sama-sama menggunakan pengendalian internal sebagai variabel.

2	Pengaruh Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Jawa Tengah	Amalia (2014)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
3	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kapasitas Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah se-Jabodetabek	Eka Widyaningsih (2014)	Hasil ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas auditor internal secara simultan dan positif berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BPRS se-Jabodetabek yang menjadi objek penelitian. Sedangkan variabel sistem pengendalian internal dan kapasitas auditor internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPRS se-Jabodetabek
4	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	Ningrum (2018)	Hasil menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
5	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon	Hidayat (2017)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
6	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas	Romanti (2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap

	Laporan Keuangan (Studi Pemerintah Kota Bandung)		kualitas laporan keuangan.
7	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPR se-Kota Denpasar	Pratama (2021)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan, dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BPR se-Kota Denpasar.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



2.8 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang

empiris. Hipotesis tersebut tergantung dari hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan. (Sugiyono, 2017). Di bawah ini adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

2.8.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengawasan atau pengendalian internal yang terdapat pada perusahaan merupakan faktor yang menentukan dapat dipercaya tidaknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut apalagi seperti yang telah kita lihat sekarang, bahwa bank konvensional maupun bank syariah yang sudah go public, mengumumkan kualitas laporan keuangan mereka lewat media cetak, internet, maupun media lainnya (Widyaningsih, 2014).

Jika pengendalian internal sebuah bank lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perbankan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan resiko yang besar, dalam arti resiko untuk memberikan opini tidak sesuai kenyataan. Terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh pengendalian internal. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa evaluasi terhadapnya, yaitu dengan cara pemeriksaan internal atau sistem pengendalian internal.

Financial Accounting Standard Board (FASB) telah menyadari bahwa sistem pengendalian internal memiliki keterlibatan dalam proses pelaporan keuangan dan berkontribusi aktif untuk menciptakan praktik corporate governance yang lebih efektif (Salierno, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2018) menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal pada pemerintah Kabupaten Kebumen sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semakin baiknya pengendalian internal maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Berdasarkan hipotesis tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandar Lampung.

2.8.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam dunia modern saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi suatu keharusan. Teknologi informasi dapat membantu sumber daya manusia dalam mengelola keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh sumber daya manusia dibidang akuntansi tapi memanfaatkan teknologi bias meminimalisir kesalahan dari manusia itu sendiri.

Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Hanafi, 2013). Maka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi layaknya BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih (2014) menemukan adanya hubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi sangat penting bagi setiap organisasi terlebih pada BPRS yang memiliki banyak data nasabah dan transaksi. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang di hasilkan oleh BPRS. Berdasarkan hipotesis tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pemanfaatan Teknologi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandar Lampung

2.8.3 Pengaruh Kapasitas Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Auditor internal harus mampu mengemukakan pendapat secara jujur dan bijaksana, sesuai dengan hasil temuannya. Auditor internal harus selalu mempertahankan sikap obyektif, sehingga dapat mengemukakan temuan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian laporan atas hasil temuan harus lengkap dan didasarkan pada analisis yang obyektif. Sehingga temuan audit yang janggal dapat diantisipasi sebelum di audit lebih lanjut oleh pihak auditor eksternal.

Auditor internal digunakan untuk mendukung berjalannya manajemen perusahaan sebagai fungsi controlling yang menjamin perusahaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan mengarah kepada tujuan. Peran fungsi audit internal menjadi lebih diperluas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang awalnya hanya tanggung jawab manajemen. Fungsi audit internal digunakan sebagai sumber informasi yang independen mengenai berbagai aktivitas organisasi agar dapat membantu pengambilan keputusan yang obyektif dan akuntabel. Peran serta profesionalisme Audit Internal yang baik tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas dan kinerja keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2014) menemukan adanya hubungan positif auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baiknya derajat keterlibatan auditor internal dalam pengawasan keandalan laporan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun bertentangan dengan penelitian Widyaningsih (2014) yang memiliki hasil kapasitas auditor internal yang tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dari itu peneliti dibuat membedakan objek penelitian untuk menguji ulang apakah variabel ini berpengaruh atau sama dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hipotesis tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kapasitas Auditor Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandar Lampung.